

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan kerangka yang menjadi dasar dalam melaksanakan penelitian. Dalam Umar (2008 : 6) beberapa ahli menerangkan bahwa :

1. Desain penelitian adalah suatu cetak biru (*blue print*) dalam hal bagaimana data dikumpulkan, diukur, dan dianalisis.
2. Desain penelitian adalah suatu rencana kerja yang terstruktur dalam hal hubungan-hubungan antarvariabel secara komprehensif, sedemikian rupa agar hasil risetnya dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan riset.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa desain penelitian merupakan proses yang dilakukan peneliti untuk dapat melakukan penelitian mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan penelitian.

Metode penelitian secara umum merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif-verifikatif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan variabel yang diamati berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, sedangkan verifikatif

dilakukan untuk menguji hipotesis dengan analisis statistik. Adapun data yang digunakan ialah data primer yang diperoleh dari jawaban kuesioner yang disebarakan oleh peneliti kepada para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, yang lebih dikhususkan lagi yakni pada pegawai di Dinas-dinas Daerah. Data diolah dengan menggunakan teknik-teknik statistik baik dengan cara manual dan atau dengan bantuan perangkat lunak *SPSS Statistics 20*. Pengujian statistik yang digunakan adalah teknik korelasi berganda.

3.2 Definisi Variabel dan Operasionalisasi Variabel

3.2.1 Definisi Variabel dan Pengukurannya

Dalam setiap jenis penelitian tentunya tidak lepas dari istilah variabel. Variabel seperti dikemukakan oleh Arikunto (2010 : 169) bahwa “variabel adalah gejala yang bervariasi, yang menjadi objek penelitian.” Somantri dan Muhidin (2011 : 27) menyebutkan bahwa “variabel adalah karakteristik yang akan diobservasi dari satuan pengamatan.” Sedangkan Sugiyono (2012 : 58) menerangkan bahwa “variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.”

Erti Efrianti Juhariah, 2014

Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Majalengka

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dengan demikian, variabel penelitian adalah suatu karakteristik dari obyek yang akan diobservasi, dipelajari, dan ditarik kesimpulan darinya. Adapun variabel yang dianalisis dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yakni :

1. Variabel bebas atau *independent variable* (X), yaitu semua variabel penyebab. Dalam penelitian ini ada tiga variabel bebas, yaitu : variabel pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah sebagai variabel bebas satu (X_1), variabel pemahaman penatausahaan keuangan daerah sebagai variabel bebas dua (X_2), dan variabel pemahaman pengelolaan aset tetap daerah sebagai variabel bebas tiga (X_3).

Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah sebagaimana yang diungkapkan Halim (2008 : 77) adalah “serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan atas transaksi dan atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Variabel pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah (X_1) terdiri dari empat dimensi, yakni : akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi aset, dan akuntansi selain kas.

Sedangkan yang dimaksud penatausahaan keuangan daerah dalam penelitian ini ialah cara penyelenggaraan administrasi keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pengelolaan keuangan daerah. Adapun variabel pemahaman penatausahaan keuangan daerah (X_2) terdiri atas dua dimensi, yaitu : penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Mahmudi (2010 : 91) aset daerah ialah “secara umum, aset pemerintah daerah adalah semua bentuk kekayaan atau sumber daya ekonomik yang dikuasai pemerintah daerah dan digunakan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.” Adapun pemahaman pengelolaan aset tetap daerah yang dimaksud dalam penelitian ialah memahami cara mengelola harta/kekayaan/sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah, yang digunakan atau dikelola dengan harapan bisa memberikan manfaat bagi pemerintah daerah yang bersangkutan serta masyarakatnya. Variabel pemahaman pengelolaan aset tetap daerah (X_3) terdiri dari 13 dimensi, yakni : perencanaan kebutuhan dan penganggaran aset daerah; pengadaan aset daerah; penerimaan, penyimpanan dan penyaluran aset daerah; penggunaan aset daerah; penatausahaan aset daerah; pemanfaatan aset daerah; pengamanan dan pemeliharaan aset daerah; penilaian aset daerah; penghapusan aset daerah; pemindahtanganan aset daerah; pembinaan, pengawasan dan

Erti Efrianti Juhariah, 2014

Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Majalengka

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pengendalian aset daerah; pembiayaan aset daerah; dan tuntutan ganti rugi aset daerah.

Pengumpulan data mengenai variabel diperoleh dari kuesioner yang diajukan kepada responden. Variabel penelitian yang akan diukur dijabarkan menjadi dimensi, dimensi dijabarkan menjadi sub variabel, dan sub variabel dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. Selanjutnya indikator-indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk membuat item instrumen yang berupa uraian atau pernyataan yang harus dijawab oleh responden. Instrumen untuk pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah terdiri dari delapan item, pemahaman penatausahaan keuangan daerah terdiri dari delapan item, dan pemahaman pengelolaan aset tetap daerah terdiri dari 24 item.

Skala jenis data menggunakan skala interval. Riduwan (2012 : 26) menyebutkan bahwa “skala interval adalah skala yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain dan mempunyai bobot yang sama.” Sedangkan tipe skala pengukuran untuk uraian atau pernyataan-pernyataan dalam instrumen penelitian menggunakan skala *likert* lima poin (*5-point likert scale*).

Riduwan (2003 : 12) menyatakan bahwa “skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial.” Skala *likert* lima poin terdiri dari angka 1 yang menunjukkan sangat tidak paham, angka 2 tidak paham, angka 3 netral, angka 4

Erti Efrianti Juhariah, 2014

Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Majalengka

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

paham, dan angka 5 sangat paham. Semakin tinggi angka, semakin mendukung hipotesis yang diajukan oleh penulis.

2. Variabel terikat atau *dependent variable* (Y) adalah variabel tergantung atau variabel akibat. Dalam penelitian ini ada satu variabel terikat yakni kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y).

Adapun kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dimaksud dalam penelitian ialah sebagaimana yang diungkapkan Mahmudi (2010) yakni meliputi : relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Yusuf (2013 :

- 1) mengemukakan bahwa :

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada *stakeholders* yang di dalamnya mencakup berbagai macam pekerjaan yang membutuhkan keuangan, termasuk komponen aset yang tercermin dalam neraca (kini dikenal sebagai “laporan posisi keuangan”) daerah di mana setiap tahun dibuatkan laporannya setelah pelaksanaan anggaran.

Adapun instrumen untuk kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari 11 item. Skala jenis data menggunakan skala interval. Sedangkan tipe skala pengukuran untuk uraian atau pernyataan-pernyataan dalam instrumen penelitian menggunakan skala *likert* lima poin (*5-point likert scale*). Skala *likert* lima poin terdiri dari angka 1 yang menunjukkan sangat tidak setuju, angka 2 tidak setuju, angka 3 netral, angka 4 setuju, dan angka 5 sangat setuju. Semakin tinggi angka, semakin mendukung hipotesis yang diajukan oleh penulis.

Erti Efrianti Juhariah, 2014

Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Majalengka

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Data yang terkumpul dari responden dianalisis dan dilakukan pembobotan dengan cara menghitung frekuensi jawaban dari masing-masing responden. Untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh kondisi dari setiap variabel maka dilakukan pengklasifikasian dengan cara sebagai berikut :

1. Menentukan Range (R), yaitu data terbesar dikurangi dengan data terkecil.

$$R = \text{Data terbesar} - \text{Data terkecil}$$
2. Menentukan banyaknya kriteria yang akan dibuat, untuk penelitian ini hanya akan menggunakan tiga kriteria, yaitu : rendah, sedang, dan tinggi.
3. Menentukan panjang interval kelas (I)

$$I = R/\text{Jumlah kategori}$$

Selanjutnya data dibagi ke dalam kelas interval dan disajikan dalam bentuk tabel seperti berikut.

Tabel 3.1
Format Tabulasi Jawaban Responden

Kriteria	Interval	Frekuensi	Frekuensi Presentase (%)
Rendah			
Sedang			
Tinggi			
Jumlah			

Erti Efrianti Juhariah, 2014

Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Majalengka

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Selain itu, untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi dari masing-masing dimensi maka setelah data terkumpul dari responden dapat dilakukan dengan cara menghitung frekuensi jawaban dari masing-masing responden.

3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Cooper (dalam Supranto, 2009 : 42) menyatakan bahwa :

An operational definition is a definition started in terms of specific testing criteria on operation. These terms must have empirical referent (that is we must able to count, measure, or is some other way gather the information through our senses). Whether the object to be defined is physical (e.g., a machine tool) or a highly abstract (e.g., achievement motivation) the definition must specify the characteristic to study and how they are to be observed. The specification and procedures must be so clear that any competent person using them would classify the objects in the same way.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat dirumuskan bahwa operasionalisasi variabel adalah rincian dari setiap variabel yang akan diukur dalam penelitian dengan menggunakan indikator-indikator yang jelas dan terukur. Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator-indikator dari setiap variabel penelitian, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan dengan benar. Untuk mengetahui variabel dalam penelitian ini lebih jelas dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut.

Erti Efrianti Juhariah, 2014

Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Majalengka

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel

VARIABEL	DIMENSI	INDIKATOR	SKALA	NO. ITEM
Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1 /SAKD)	Akuntansi penerimaan kas (SAKD1)	1. Sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas	Interval	1,2
	Akuntansi pengeluaran kas (SAKD2)	1. Sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas		3,4
	Akuntansi aset (SAKD3)	1. Sistem dan prosedur akuntansi aset		5,6
	Akuntansi selain kas (SAKD4)	1. Sistem dan prosedur akuntansi selain kas yang meliputi pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas.		7,8
	Sumber: Mahmudi (2010:22)			
Pemahaman Penatausahaan Keuangan Daerah (X_2 /PKD)	Penatausahaan penerimaan (PKD1)	1. Sistem akuntansi penerimaan 2. Data kelengkapan bukti penerimaan dan/atau pembayaran diantaranya : Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-	Interval	9,10

Erti Efrianti Juhariah, 2014

Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Majalengka

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

		Daerah), Surat Ketetapan Retribusi (SKR), Surat Tanda Setoran (STS), Surat tanda bukti pembayaran, dan Bukti penerimaan lainnya yang sah.		
	Penatausahaan pengeluaran (PKD2)	1. Sistem akuntansi pengeluaran 2. Prosedur penyediaan dana		11, 12, 13, 14, 15, 16
VARIABEL	DIMENSI	INDIKATOR	SKALA	NO. ITEM
	Sumber: Permendagri Nomor 13 Tahun 2006	3. Prosedur permintaan pembayaran 4. Prosedur perintah membayar 5. Prosedur pencairan dana 6. Prosedur pertanggungjawaban penggunaan dana		
Pemahaman Pengelolaan Aset Tetap Daerah (X_3 /PATD)	Perencanaan kebutuhan dan penganggaran aset daerah (PATD1)	1. Proses merumuskan rincian kebutuhan aset daerah 2. Proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai bahan dalam penyusunan Rencana APBD	Interval	17, 18
	Pengadaan aset daerah (PATD2)	1. Prosedur pemenuhan kebutuhan aset		19
	Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran	1. Proses administrasi penerimaan aset daerah 2. Prosedur		20, 21, 22

Erti Efrianti Juhariah, 2014

Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Majalengka

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

	aset daerah (PATD3)	penyimpanan aset di gudang penyimpanan 3. Prosedur penyaluran/pengiriman aset dari gudang ke unit kerja pemakai		
	Penggunaan aset daerah (PATD4)	1. Proses pengelolaan penatausahaan aset sesuai tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.		23
	Penatausahaan aset daerah (PATD5)	1. Prosedur pencatatan aset daerah 2. Inventarisasi aset daerah 3. Pelaporan aset daerah mencakup laporan pengguna barang		
VARIABEL	DIMENSI	INDIKATOR	SKALA	NO. ITEM
		semesteran, laporan pengguna barang tahunan, dan laporan pengguna barang lima tahunan		24, 25, 26
	Pemanfaatan aset daerah (PATD6)	1. Prosedur pendayagunaan aset sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna		27

	Pengamanan dan pemeliharaan aset daerah (PATD7)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pengendalian dan pengurusan aset daerah secara administratif 2. Proses pengendalian dan pengurusan aset daerah secara fisik 3. Proses pengamanan aset daerah melalui tindakan upaya hukum 		28, 29, 30
	Penilaian aset daerah (PATD8)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses penilaian aset daerah 		31
	Penghapusan aset daerah (PATD9)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur penghapusan aset dari daftar barang 		32
	Pemindahtanganan aset daerah (PATD10)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur pengalihan aset melalui penjualan aset 2. Prosedur pengalihan aset melalui pertukaran aset 3. Prosedur pengalihan aset melalui hibah 4. Prosedur pengalihan aset melalui 		33, 34, 35, 36
VARIABEL	DIMENSI	INDIKATOR	SKALA	NO. ITEM
		penyertaan modal.		
	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset daerah (PATD11)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses penjaminan dan pengarahan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan 2. Proses penilaian kenyataan 3. Pelaksanaan kegiatan 		37, 38

Erti Efrianti Juhariah, 2014

Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Majalengka

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

	Pembiayaan aset daerah (PATD12)	1. Prosedur pembiayaan penyelenggaraan kegiatan		39
	Tuntutan ganti rugi aset daerah (PATD13)	1. Prosedur tuntutan ganti rugi aset daerah		40
	Sumber: Permendagri Nomor 17 Tahun 2007			
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y/KLKPD)	Relevan (KLKPD1)	1. Tepat waktu 2. Lengkap 3. Memiliki manfaat umpan balik (<i>feedback value</i>) 4. Memiliki manfaat prediktif (<i>predictive value</i>)	Interval	41, 42, 43, 44
	Andal (KLKPD2)	1. Penyajian yang jujur (<i>faithfulness of presentation</i>) 2. Dapat diverifikasi (<i>verifiability</i>) 3. Netralitas		45, 46, 47
	Dapat dibandingkan (KLKPD3)	1. Dapat dibandingkan (dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan daerah lain pada		48,49
VARIABEL	DIMENSI	INDIKATOR	SKALA	NO. ITEM
		umumnya) serta klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar		

Erti Efrianti Juhariah, 2014

Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Majalengka

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

		periode disajikan secara konsisten	
	Dapat dipahami (KLKPD4) Sumber: Mahmudi (2010 : 11)	1. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan jelas, sederhana, mudah dipahami oleh pengguna karena dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna	50,51

3.3 Populasi dan Sampel

Sebagaimana pendapat Sugiyono (2012 : 115) bahwa “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Dalam *Encyclopedia of Educational Evaluation* (dalam Arikunto, 2010 :173) tertulis ‘*A population is a set (or collection) of all elements possessing one or more attributes of interest.*’ Berdasarkan definisi tersebut, maka populasi merupakan keseluruhan obyek atau subyek penelitian.

Erti Efrianti Juhariah, 2014

Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Majalengka

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Majalengka, yang lebih dikhususkan lagi yakni pada para pegawai di Dinas-dinas Daerah. Adapun dinas yang ada di Kabupaten Majalengka berjumlah 12 dinas. Dengan demikian, populasi dalam penelitian ini berjumlah 12 dinas.

Sedangkan sampel seperti dikemukakan oleh Arikunto (2010 : 174) bahwa “sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.” Sugiyono (2012 : 116) menyatakan bahwa “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.” Dengan kata lain, sampel ialah bagian dari populasi yang dipilih untuk dipelajari.

Teknik pengambilan sampel (*sampling*) dalam penelitian ini ialah dengan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* seperti yang diungkapkan Riduwan (2012 : 16) ialah “teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu.” Sarwono & Suhayati (2010 : 50) mengungkapkan bahwa teknik penilaian (*judgement*) atau dikenal juga dengan *purposive sampling* dilakukan dengan cara memilih sampel dari suatu populasi didasarkan pada informasi yang tersedia serta sesuai dengan penelitian yang sedang dilaksanakan, sehingga perwakilannya terhadap populasi dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, *purposive sampling* adalah teknik penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik yang ditetapkan

Erti Efrianti Juhariah, 2014

Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Majalengka

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

terhadap elemen populasi target yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian.

Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum, penyelenggaraan administrasi kesekretariatan serta pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan. Dasar pertimbangannya adalah dengan wewenang yang dimilikinya maka para pegawai tersebut berkompeten sehingga mampu mengidentifikasi dan menentukan jawaban yang sesuai atas pernyataan dalam kuesioner terkait dengan variabel penelitian.

Pada tiap dinas disebar 3 kuesioner yang ditujukan kepada Kepala Dinas, Pejabat Sekretariat Sub Bagian Keuangan/Akuntansi dan atau Pelaporan, serta Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) atau Pejabat Sekretariat Sub Bagian Umum. Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini berjumlah 36 orang.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian diperoleh dari data primer yakni sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) dan data sekunder yakni data yang diperoleh dari pihak atau sumber lain yang sudah diolah

Erti Efrianti Juhariah, 2014

Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Majalengka

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dan didapatkan melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Ada tiga macam teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak terkait untuk memperoleh informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Studi Pustaka (*Library Research*)

Melalui studi pustaka, penelitian dilakukan dengan menelaah dan membandingkan sumber kepustakaan guna memperoleh data yang bersifat teoretis untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, komprehensif, mengenai peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, serta referensi-referensi lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3. Kuesioner (*Questionnaires*)

Kuesioner adalah instrumen pengumpulan data atau informasi yang dioperasionalkan ke dalam bentuk item, pertanyaan atau pernyataan tertulis yang harus dijawab oleh responden.

3.5 Analisis Data dan Rancangan Pengujian Hipotesis

Erti Efrianti Juhariah, 2014

Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Majalengka

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Korelasi ditemukan oleh Karl Pearson pada awal 1900. Korelasi merupakan istilah statistik yang menyatakan derajat hubungan antar variabel. Adapun korelasi berganda (*multiple correlation*) merupakan alat ukur mengenai hubungan yang terjadi antara variabel terikat (Y) dengan dua atau lebih variabel bebas ($X_1, X_2, X_3, \dots X_n$). Melalui korelasi berganda ini, keeratan hubungan antara variabel-variabel tersebut dapat diketahui. Keeratan hubungan dinyatakan dengan istilah koefisien korelasi. Dalam penelitian ini digunakan dua macam koefisien korelasi, yakni koefisien korelasi parsial dan koefisien korelasi ganda.

Berikut ialah kriteria penilaian dalam memberikan penafsiran terhadap besar atau kecil koefisien korelasi yang ditemukan.

Tabel 3.3
Kriteria Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat

Sumber: Sugiyono (2002 : 216)

3.5.1 Koefisien Korelasi

Erti Efrianti Juhariah, 2014

Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Majalengka

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Koefisien korelasi parsial antara pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah (X_1) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y), dimana penatausahaan keuangan daerah (X_2) dan pengelolaan aset tetap daerah (X_3) tetap (tidak memberikan pengaruh) ditunjukkan dengan rumus :

$$r_{Y1.23} = \frac{r_{Y1.2} - r_{Y3.2}r_{13.2}}{\sqrt{(1 - r_{Y3.2}^2)(1 - r_{13.2}^2)}} \quad (\text{Hasan, 2008 : 276})$$

Koefisien korelasi parsial antara penatausahaan keuangan daerah (X_2) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y), dimana sistem akuntansi keuangan daerah (X_1) dan pengelolaan aset tetap daerah (X_3) tetap ditunjukkan dengan rumus :

$$r_{Y2.13} = \frac{r_{Y2.3} - r_{Y1.3}r_{21.3}}{\sqrt{(1 - r_{Y1.3}^2)(1 - r_{21.3}^2)}} \quad (\text{Hasan, 2008 : 276})$$

Koefisien korelasi parsial antara pengelolaan aset tetap daerah (X_3) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y), dimana sistem akuntansi keuangan daerah (X_1) dan penatausahaan keuangan daerah (X_2) tetap ditunjukkan dengan rumus :

$$r_{Y3.12} = \frac{r_{Y3.1} - r_{Y2.1}r_{32.1}}{\sqrt{(1 - r_{Y2.1}^2)(1 - r_{32.1}^2)}} \quad (\text{Hasan, 2008 : 276})$$

dimana :

koefisien korelasi antara Y dan X_1 , dimana X_2 tetap

$$r_{Y1.2} = \frac{r_{Y1} - r_{Y2}r_{12}}{\sqrt{(1 - r_{Y2}^2)(1 - r_{12}^2)}}$$

koefisien korelasi antara Y dan X_2 , dimana X_1 tetap

$$r_{Y2.1} = \frac{r_{Y2} - r_{Y1}r_{12}}{\sqrt{(1 - r_{Y1}^2)(1 - r_{12}^2)}}$$

koefisien korelasi antara Y dan X_1 , dimana X_3 tetap

$$r_{Y1.3} = \frac{r_{Y1} - r_{Y3}r_{13}}{\sqrt{(1 - r_{Y3}^2)(1 - r_{13}^2)}}$$

koefisien korelasi antara Y dan X_2 , dimana X_3 tetap

$$r_{Y2.3} = \frac{r_{Y2} - r_{Y3}r_{23}}{\sqrt{(1 - r_{Y3}^2)(1 - r_{23}^2)}}$$

koefisien korelasi antara Y dan X_3 , dimana X_1 tetap

$$r_{Y3.1} = \frac{r_{Y3} - r_{Y1}r_{31}}{\sqrt{(1 - r_{Y1}^2)(1 - r_{31}^2)}}$$

koefisien korelasi antara Y dan X_3 , dimana X_2 tetap

$$r_{Y3.2} = \frac{r_{Y3} - r_{Y2}r_{32}}{\sqrt{(1 - r_{Y2}^2)(1 - r_{32}^2)}}$$

koefisien korelasi antara X_1 dan X_3 , dimana X_2 tetap

$$r_{13.2} = \frac{r_{13} - r_{12}r_{32}}{\sqrt{(1 - r_{12}^2)(1 - r_{32}^2)}}$$

Erti Efrianti Juhariah, 2014

Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Majalengka

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

koefisien korelasi antara X_2 dan X_1 , dimana X_3 tetap

$$r_{21.3} = \frac{r_{21} - r_{23}r_{13}}{\sqrt{(1 - r_{23}^2)(1 - r_{13}^2)}}$$

koefisien korelasi antara X_3 dan X_2 , dimana X_1 tetap

$$r_{32.1} = \frac{r_{32} - r_{32}r_{21}}{\sqrt{(1 - r_{32}^2)(1 - r_{21}^2)}}$$

koefisien korelasi antara Y dan X_1

$$r_{Y1} = \frac{n\Sigma X_1 Y - (\Sigma X_1)(\Sigma Y)}{\sqrt{n \Sigma X_1^2 - (\Sigma X_1)^2} \sqrt{n \Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2}}$$

koefisien korelasi antara Y dan X_2

$$r_{Y2} = \frac{n\Sigma X_2 Y - (\Sigma X_2)(\Sigma Y)}{\sqrt{n \Sigma X_2^2 - (\Sigma X_2)^2} \sqrt{n \Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2}}$$

koefisien korelasi antara Y dan X_3

$$r_{Y3} = \frac{n\Sigma X_3 Y - (\Sigma X_3)(\Sigma Y)}{\sqrt{n \Sigma X_3^2 - (\Sigma X_3)^2} \sqrt{n \Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2}}$$

koefisien korelasi antara X_1 dan X_2

$$r_{12} = \frac{n\Sigma X_1 X_2 - (\Sigma X_1)(\Sigma X_2)}{\sqrt{n \Sigma X_1^2 - (\Sigma X_1)^2} \sqrt{n \Sigma X_2^2 - (\Sigma X_2)^2}}$$

koefisien korelasi antara X_1 dan X_3

$$r_{13} = \frac{n\Sigma X_1 X_3 - (\Sigma X_1)(\Sigma X_3)}{\sqrt{n\Sigma X_1^2 - (\Sigma X_1)^2} \sqrt{n\Sigma X_3^2 - (\Sigma X_3)^2}}$$

koefisien korelasi antara X_2 dan X_3

$$r_{23} = \frac{n\Sigma X_2 X_3 - (\Sigma X_2)(\Sigma X_3)}{\sqrt{n\Sigma X_2^2 - (\Sigma X_2)^2} \sqrt{n\Sigma X_3^2 - (\Sigma X_3)^2}}$$

Untuk menguji koefisien korelasi parsial digunakan rumus :

$$t = \frac{r_p \sqrt{n-3}}{\sqrt{1-r_p^2}} \quad (\text{Sugiyono, 2002 : 222})$$

Dengan rumusan hipotesis :

$H_0: r_{Y1.23} = 0$, tidak terdapat pengaruh positif antara pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah (X_1) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y)

$H_a: r_{Y1.23} \neq 0$, terdapat pengaruh positif antara pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah (X_1) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y)

$H_0: r_{Y2.13} = 0$, tidak terdapat pengaruh positif antara penatausahaan keuangan daerah (X_2) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y)

Erti Efrianti Juhariah, 2014

Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Majalengka

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

$H_a: r_{Y2.13} \neq 0$, terdapat pengaruh positif antara penatausahaan keuangan daerah (X_2) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y)

$H_o: r_{Y3.12} = 0$, tidak terdapat pengaruh positif antara pengelolaan aset tetap daerah (X_3) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y)

$H_a: r_{Y3.12} \neq 0$, terdapat pengaruh positif antara pengelolaan aset tetap daerah (X_3) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y)

Sehingga :

H_a diterima dan H_o ditolak, jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$

H_a ditolak dan H_o diterima, jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$

Untuk menentukan hubungan antara sistem akuntansi keuangan daerah (X_1), penatausahaan keuangan daerah (X_2) dan pengelolaan aset tetap daerah (X_3) secara bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) digunakan korelasi ganda dengan simbol R. Adapun rumusnya ialah sebagai berikut :

$$r_{Y.123} = \sqrt{\frac{b_1 \sum x_1 y + b_2 \sum x_2 y + b_3 \sum x_3 y}{\sum y^2}} \quad (\text{Hasan, 2008 : 276})$$

Untuk pengujian korelasi ganda digunakan uji F dengan rumus :

$$F_{hitung} = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)} \quad (\text{Sugiyono, 2002 : 219})$$

Dengan rumusan hipotesis :

$H_0: R = 0$, tidak terdapat pengaruh positif antara pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah (X_1), penatausahaan keuangan daerah (X_2) dan pengelolaan aset tetap daerah (X_3) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y)

$H_a: R \neq 0$, terdapat pengaruh positif antara pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah (X_1), penatausahaan keuangan daerah (X_2) dan pengelolaan aset tetap daerah (X_3) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y)

Sehingga :

H_a diterima dan H_0 ditolak, jika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$

H_a ditolak dan H_0 diterima, jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$

3.5.2 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi dari pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah (X_1) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y), jika penatausahaan keuangan daerah (X_2) dan pengelolaan aset tetap daerah (X_3) tetap:

Erti Efrianti Juhariah, 2014

Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Majalengka

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

$$KD_{Y1.23} = r^2_{Y1.23} \times 100\%$$

Koefisien determinasi dari penatausahaan keuangan daerah (X_2) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y), jika sistem akuntansi keuangan daerah (X_1) dan pengelolaan aset tetap daerah (X_3) tetap :

$$KD_{Y2.13} = r^2_{Y2.13} \times 100\%$$

Koefisien determinasi dari pengelolaan aset tetap daerah (X_3) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y), jika sistem akuntansi keuangan daerah (X_1) dan penatausahaan keuangan daerah (X_2) tetap :

$$KD_{Y3.12} = r^2_{Y3.12} \times 100\%$$

Koefisien determinasi dari sistem akuntansi keuangan daerah (X_1), penatausahaan keuangan daerah (X_2) dan pengelolaan aset tetap daerah (X_3) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) :

$$KD = R^2 \times 100\%$$